

**SKRIPSI**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA WIRAYUDA KECAMATAN  
KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG  
KALIMANTAN BARAT**



**DISUSUN OLEH:**

**JULPISAL SWASMAN**  
**16520168**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

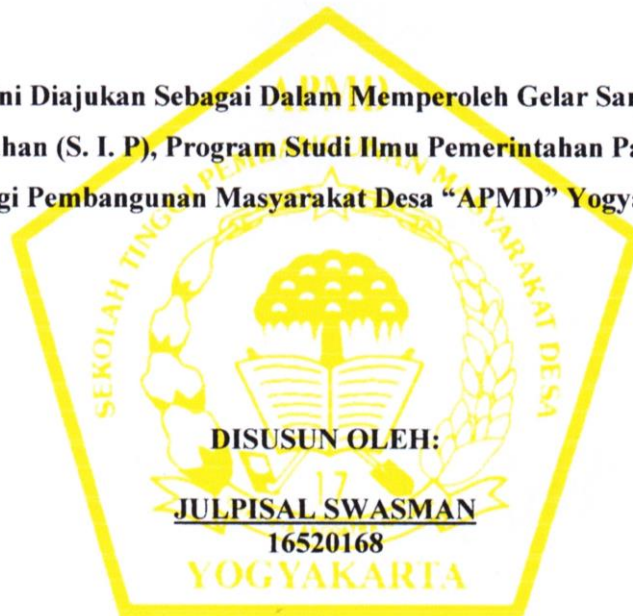
**YOGYAKARTA**

**2023**

**SKRIPSI**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA WIRAYUDA KECAMATAN  
KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG  
KALIMANTAN BARAT**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan (S. I. P), Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah  
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**




**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

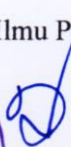
Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketua/Penguji/Pembimbing	
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si</u> Penguji Samping I	
<u>Dr. R. Yulianus Gatot, M. Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Rijel Samaloisa

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julpisal Swasman

NIM : 16520168

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Julpisal Swasman  
16520168

## MOTTO

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.**

**Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.**

**Tidak ada kemudahan tanpa doa.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas izin-Nya dan berkat-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Jipin dan Ibu Saliwati yang selama ini selalu sabar dan selalu memberi semangat dan nasihat kepada saya.
3. Kepada kakak, abang dan adik-adik saya.
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya.
5. Teman-teman yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi yaitu Teofilus Hagi, Salom , Wahyu, Caldvin, Ilham, Topan, Ogud, dan lain-lain.
6. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2016.
7. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WIRAYUDA KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dikemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Sri Utami, M. Si selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M. Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

6. Pemerintah Desa Wirayuda beserta masyarakat Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik bentuk maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Penulis



Julpisal Swasman



## INTISARI

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul “Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Desa”. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pembangunan merupakan tolak ukur suatu desa, maka dari itu diperlukan kapasitas untuk dapat melaksanakan pembangunan, yaitu kemampuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Hal ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga timbul rasa tanggung jawab dalam proses pembangunan yang efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila hal tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Desa?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus pada Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Dengan jumlah responden sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur ekonomi pembangunan, kaur umum, kepala dusun, ketua RT, karang taruna desa dan masyarakat desa. Pemilihan subjek penelitian ditentukan secara purposive. Pada tahap analisis data peneliti menggunakan metode triangulasi data, reduksi data, penyajian data dan menarik suatu kesimpulan dari hasil data yang diperoleh saat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”. *Pertama*, Pemerintah Desa Wirayuda sudah memiliki kemampuan di dalam melaksanakan pembangunan, hanya saja pada proses pembangunan harus adanya aspek-aspek kemampuan yang mendukung agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang ada. Adapun aspek kemampuan tersebut, yaitu kemampuan fisik, kemampuan keuangan, kemampuan teknis dan kemampuan konseptual serta harus ada kerjasama dan partisipasi dari masyarakat desa. *Kedua*, Pemerintah desa Wirayuda memiliki pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. membangun berbagai infrastruktur di desa berdasarkan atas aspirasi masyarakat dan dilaksanakan pembangunan yang menjadi prioritas di desa. *Ketiga*, Pemerintah Desa Wirayuda belum memiliki keterampilan di dalam pembangunan infrastruktur desa, hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab berdasarkan target yang telah ditentukan. Pada keterampilan pemerintah desa sendiri, pemerintah desa tidak berani untuk melanggar aturan, dan mereka hanya menjalankan perintah dan arahan dari kepala desa.

Kata Kunci : Kapasitas, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	11
1. Kapasitas Pemerintah Desa .....	11
a. Kemampuan Pemerintah Desa .....	12
b. Pemahaman Pemerintah Desa .....	15
c. Keterampilan Pemerintah Desa.....	16
2. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	18
F. Ruang Lingkup.....	22
G. Unit Analisis .....	23
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA</b> .....	<b>29</b>
A. Kondisi Geografis .....	29

B. Kondisi Demografis .....	33
C. Kondisi Ekonomi .....	39
D. Kondisi Sosial dan Budaya .....	39
E. Kondisi wilayah .....	40
F. Kondisi Pemerintah Desa Wirayuda .....	41
<b>BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa...55	
B. Pemahaman Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa....65	
C. Keterampilan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa .70	
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan.....	23
Tabel 2.1 Penduduk Desa.....	33
Tabel 2.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	34
Tabel 2.3 Mata Pencarian.....	35
Tabel 2.4 Pendidikan.....	36
Tabel 2.5 Sarana Prasarana Pendidikan .....	37
Tabel 2.6 Agama .....	38
Tabel 2.7 Pengurus Adat .....	41
Table 2.8 Pemerintah Desa .....	42
Table 2.9 Badan Permusyawaratan Desa .....	44
Table 2.10 PKK Desa Wirayuda.....	45
Tabel 2.11 Daftar RT Desa Wirayuda.....	47
Tabel 2.12 Rencana Pembangunan Desa Wirayuda Tahun 2022 .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi terwujudnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh dengan pengelolaannya melibatkan segenap pemerintah pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sampai di tingkat pemerintahan yang paling terbawah yaitu desa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Tepatlah kiranya jika desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya Nomor 47 Tahun 2015, menuntut penyiapan dan

penguatan kapasitas pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa agar lebih siap dalam pelaksanaan tugas menjalankan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 75 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Artinya pemerintah desa dengan segenap tugas dan tanggung jawab itu harus mampu melaksanakan tugas mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kapasitas, menurut Soeprpto (2010:10); “kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Dari pendapat pakar tersebut artinya pemerintah desa harus memiliki pemahaman yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik, kemudian keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Namun dalam prakteknya peran dan prakarsa pemerintah desa masih kurang terasa terutama di dalam pemerintahan desa. Dalam pembangunan infrastruktur

desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Hal ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga timbul rasa tanggung jawab dalam proses pembangunan yang efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila hal tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dalam lingkungan masyarakat desa sangatlah penting, karena dengan adanya pembangunan akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam membangun desa. Pada dasarnya pemerintah desa telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pembangunan infrastruktur berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pelaksanaannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses Pembangunan infrastruktur dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan, pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan pihak-pihak di pemerintah desa dalam setiap proses pembangunan infrastruktur. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara

mendalam dengan pihak-pihak di pemerintah desa yang terkait dalam proses Pembangunan infrastruktur dengan peraturan proses Pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti menganggap sangat penting untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Kapasitas Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Dimana dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini dirasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah desa yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, penyusun merumuskan masalah adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan dijadikan acuan atau khasanah kepustakaan sebagai pedoman dalam penelitian yang berkaitan dengan manajemen pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur.

Pada penulisan skripsi ini peneliti sadar masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mencari dan memahami berbagai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam proses penulisan skripsi ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti uraikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1.) Taupiq Gandhi Mahatma, Rury Febrina (<https://jom.unri.ac.id/> oleh Mahatma, 2021)

a. Judul Penelitian

KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSUMBER DANA DESA KAMPUNG RAWANG KAO KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TAHUN 2018.

b. Lokasi Penelitian

Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

c. Hasil Penelitian

Bagaimana Kapasitas Pemerintahan dalam Pembangunan Infrasutruktur Bersumber Dana Desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak 2018 belum optimal. Ini terbukti berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa:

Kemampuan Pemerintah Kampung Rawang Kao masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan masih terdapat aparatur pemerintah kampung yang masih bingung akan tugas dan fungsinya, hanya sekedarnya saja dalam melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan kampung. Keterampilan yang dimiliki Aparatur kampung kiranya perlu ditingkatkan lagi guna untuk menjadikan aparatur pemerintahan yang kompeten dalam bidang yang dijalankannya. Pemahaman terkait dengan penggunaan dana desa dan pembangunan yang akan di selenggarakan sudah dijelaskan oleh penghulu kampung namun kiranya aparatur kampung perlu memahami dengan rinci prioritas yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis untuk dana desa agar terciptanya lingkungan yang optimal dalam

perancangan dan juga dalam pengelolaan dana desa. Sikap pemerintah kampung dalam hal menanggapi prioritas yang harus diambil dalam penggunaan dana desa dan bagaimana tindakan yang perlu diambil guna memberikan dampak yang baik bagi keadaan masyarakat terkait penggunaan dana desa tersebut. Kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam pembangunan infrastruktur bersumber dana desa masih belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, masih banyak aparatur desa yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Pelatihan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah pusat dirasa sangat berperan penting dalam peningkatan kapasitas aparatur kampung. Kemampuan aparatur kampung sangat berpengaruh terhadap kinerja yang akan di berikan, dengan demikian sumber daya manusia seharusnya kembali diseleksi dengan baik agar pemerintahan kampung bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang optimal.

2.) Moh Hasan Sabilil Maula (<https://repository.unej.ac.id/> oleh Maula, 2017)

a. Judul Penelitian

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN  
JOMBANG KABUPATEN JEMBER.

b. Lokasi Penelitian

Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

c. Hasil Penelitian

1. Kapasitas regulasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa Peraturan desa RKPDesa, Peraturan desa APBDesa, dan SK kepala desa tentang penetapan TPK. Sedangkan Perdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa masih belum selesai, SK kepala desa tentang rencana kerja pelaksanaan pembangunan tidak dibuat, dan SK kepala desa tentang perubahan pelaksanaan kegiatan tidak diadakan. Karena di Desa Wringinagung pada tahun 2016 tidak mengadakan perubahan pelaksanaan kegiatan. Tetapi pada regulasi yang telah diundangkan masih terdapat permasalahan.
2. Kapasitas ekstraksi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa terserapnya 40 orang tenaga kerja asli desa. Pemerintah desa juga berhasil menggerakkan aset sosial, berupa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk asset alam tidak di Ekstrasi oleh pemerintah desa, karena aset alam Desa Wringinagung tidak bisa dijadikan sebagai bahan atau material pembangunan infrastruktur desa.
3. Kapasitas distribusi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sedangkan untuk distribusi kewenangan masih terjadi ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari actor-aktor pembangunan infrastruktur desa.
4. Kapasitas responsive pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa respon secara verbal, tanpa ada Tindakan untuk mencegah ataupun menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur desa.

5. Kapasitas jaringan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa Kerjasama pemerintah desa dengan dinas pekerjaan umum, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sedangkan Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa hanya berupa Kerjasama dokumen administrative saja.

3.) Ari Kusumah Wardani, Slamet Riyadi (<https://jurnal.unigal.ac.id/> oleh Wardani, 2020)

a. Judul Penelitian

ANALISIS PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS.

b. Lokasi Penelitian

Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

c. Hasil Penelitian

Pemerintah Desa hanya berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak lepas dari peran sumber daya manusia sebagai subjek dalam menjalankan roda pemerintahan tertentu. Tidak berbeda dengan Pemerintahan Desa, maka yang menjadi pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa berpusat pada kepemimpinan dari seorang Kepala Desa. Kepala Desa yang inovatif tentunya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kreatifitas tetapi diperlukan juga jiwa *entrepreneurship* atau kewirausahaan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam memimpin masyarakatnya dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Desa.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Pada ketiga penelitian terdahulu lebih berbicara kepada kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dan penguatan kapasitas pada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, dilihat dari penggunaan dananya, yaitu dari dana desa, membuat kebijakan, mendistribusikan pelaksanaan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat, mersepon kebutuhan masyarakat, serta membuat jejaring dalam melaksanakan pembangunan di desa.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kapasitas Pemerintah Desa**

Menurut Soeprapto (2010:09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan tujuan yang dicita-citakan”. Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Soeprapto (2010:10), “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya Wardianto Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik di lingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu:

- 1) Kemampuan
- 2) Pemahaman
- 3) Keterampilan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Kapasitas dapat diukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

#### **a. Kemampuan Pemerintah Desa**

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson (dalam Purba & Indriani, 2013) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Thoha (2002:154) kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengetahuan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Kemampuan yang peneliti maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (2001:29) bahwa kemampuan kerja



yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan.

Sementara itu, menurut Steers (dikutip dari Jurnal Bina Praja: 104) bahwa kemampuan pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan pemerintah yang di dalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

1) *Technical Skill* (kemampuan teknis)

Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.

2) *Human Skill* (kemampuan bersifat manusiawi)

Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.

3) *Conceptual Skill* (kemampuan konseptual)

Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

Menurut pengertian di atas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah seorang di dalam organisasinya yang dalam hal ini berfokus pada

pemerintah desa harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Artinya bahwa seorang yang mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan hasil kerja sehingga lebih maksimal. Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja dengan *team work* atau kelompok kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi.

Anggota organisasi yang dimaksud adalah perangkat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna,

sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*. (skripsi Randa Ade. 1452010, Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa).

Berdasarkan teori kemampuan dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa mampu melaksanakan segala bentuk perencanaan dengan memperhatikan kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta memiliki indikator-indikator kemampuan, seperti kemampuan teknis, kemampuan bersifat manusiawi, dan kemampuan konseptual.

#### **b. Pemahaman Pemerintah Desa**

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar (2016:27), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Sementara Benjamin S. Bloom (skripsi Randa Ade. 1452010, Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, 2016:27), mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu

diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Berbeda dengan Nana Sudjana (2004: 24), ia mengungkapkan bahwa Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu, tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Tingkat yang ketiga atau tingkat yang tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Berdasarkan teori pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa harus memiliki pemahaman dalam memahami kebutuhan atau prioritas masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Dengan pemahaman tersebut maka pemerintah desa akan memiliki kapasitas dalam melaksanakan setiap bentuk kegiatan yang menjadi rencana.

### **c. Keterampilan Pemerintah Desa**

Menurut Amirullah dan Budiyo (2014:21) menjelaskan bahwa “Skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai tujuan yang diinginkan”. Menurut Bateman dan Snell (2012:10) menjelaskan “Keterampilan

merupakan bagian dari manajemen pengetahuan yang merupakan sekumpulan praktik yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan sumber-sumber data intelektual dari organisasi sepenuhnya mendayagunakan intelektualitas orang-orang dalam organisasi”.

Hal lain disampaikan oleh Kasmir dan Jakfar (2013:172) tentang keterampilan, ia menyatakan bahwa “Komponen organisasi yang penting adalah pekerjaan atau jabatan. Untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki karyawan”. Selanjutnya menurut Wunggu dan Brotoharsojo (skripsi Randa Ade. 1452010, Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa) keterampilan kerja adalah kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas, praktis-praktis menggunakan peralatan, manual baku atau administrative tertentu.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang harus dimiliki pemerintah desa untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan menggunakan peralatan manual buku atau administrative tertentu. Untuk itu pemerintah pemerintah desa dituntut untuk memiliki keterampilan guna meningkatkan efektivitas pekerjaan baik di kantor desa atau di lapangan guna memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan atau yang harus dijalankan oleh pemerintah desa yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa yang ada, dapat diukur melalui

tiga indikator yaitu kemampuan, pemahaman, dan keterampilan. Jika ketiga indikator ini dimiliki oleh pemerintah desa yang ada maka kapasitas aparatur desa yang ada sudah dapat diukur dan dapat ditentukan sejauhmana kinerja yang akan atau ingin dilakukan oleh pemerintah desa yang ada untuk mengelola dana desanya.

## **2. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur menjadi landasan penting dibanyak negara berkembang yang lebih mendorong kemajuan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak serta merta menghasilkan sebuah tetesan ke bawah (*trickel down effect*), sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin melebar. Pemikiran strukturalis klasik menghendaki intervensi pemerintah dalam melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar dan melakukan perbaikan struktur ekonomi secara inkremental. Dalam pendekatan ini perbaikan struktur kekuasaan dan struktur sosial tidak dilakukan secara radikal. (Prof. Dr. Rakhmat, Drs., MS, 2013:3).

Menurut Esman 1991, pembangunan merupakan proses menuju taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dalam perkembangan pembangunan, konsep pembangunan mengandung empat makna yaitu : (1) pembangunan merupakan suatu proses, dalam arti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan, (2) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, karena

dipandang sebagai suatu kebutuhan, (3) pembangunan dilaksanakan secara berencana yang beorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, dan (4) pembangunan terkait dengan dimensi modernisasi, dalam arti sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. (Prof. Dr. Rakhmat, Drs., MS, 2013:2).

Menurut Asnudin A 2005, infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan social serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa (1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan, (2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan, dan (3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan. Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: (1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, (2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin, (3) Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta (5) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan (6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat

dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, (7) Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat, (8) Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun, (8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya. (Pedoman PPIP, 2006).

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi (Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan, 2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memandai yang berupa keretsediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat



yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Suatu pembangunan infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, maka yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat didalam pembangunan tersebut, mulai dari penyusunan rencana sampai pada proyek pembangunan tersebut selesai. Jadi pembangunan perlu menjadikan pemberdayaan menjadi nilai dan pilihan kebijakan sekaligus sebagai pembelajaran sosial, dalam arti selalu belajar bagaimana melakukan pemberdayaan yang semakin hari semakin baik. Karena seperti apa yang dikemukakan oleh Soedjatmoko (Ketaren, 2008:187), bahwa pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik daripada kemarin. Pembelajaran adalah bagian inti dari pembangunan pada masa kini dan mungkin sampai pada kurun waktu yang panjang di masa depan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pembangunan Infrastruktur dapat berupa sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi, dan segala sesuatu yang memiliki wujud fisik maupun nonfisik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin melebar.

Maka dari itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diperlukan adanya kapasitas dari perangkat pemerintah desa. kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan, pemahaman dan keterampilan. Dari setiap kapasitas tersebut diharapkan bahwa perangkat pemerintah desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan erat dengan pembangunan desa. Namun disisi lain kapasitas perangkat pemerintah desa harus didukung dari peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dibuat. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat Desa Wirayuda, maka semakin cepat pula pembangunan desa dapat terealisasi.

#### **F. Ruang Lingkup**

Dari uraian kerangka teori tersebut yang dimaksud dengan dalam penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.
2. Pemahaman Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.
3. Keterampilan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

## G. Unit Analisis

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada skripsi ini adalah tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Maka Teknik pengambilan informan atau narasumber tidak dibatasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kelengkapan data bagi peneliti. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan Teknik *Purposive* yakni mengambil informan berdasarkan pihak-pihak yang terkait untuk menjadi narasumber yang dapat memberikan informasi. Berikut ini adalah deskripsi tentang informan dan pekerjaan informan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Daftar Informan

No	Nama	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1	Salawati Hehdman, SE	48	L	S1	Pemdes	Kepala Desa
2	Johansius.N,S.Hut	43	L	S1	Pemdes	Sekretaris Desa
3	Tri Lesmana Diputra	38	L	SMP	Pemdes	Kaur Keuangan
4	Lazarus A	43	L	SMA	Pemdes	Kaur Ekbang
5	Dedi	25	L	SMK	Pemdes	Kaur Umum
6	Supriyadi	47	L	SMP	Pemdes	Kepala Dusun
7	Lionsius Tamrin	40	L	SMP	Pemdes	Kepala Dusun
8	Darmin	41	L	SMP	Petani	RT 01
9	Agung Prayogo	34	L	D3	Perawat	RT 08
10	Leo Albertus	35	L	S1	Guru	RT 11
11	Suminah	46	P	SMA	Wiraswasta	Masyarakat
12	Aman	53	L	SD	Petani	Masyarakat
13	Anisa	29	P	S1	Swasta	Masyarakat
14	Suminah	35	P	SMA	Petani	Masyarakat
15	Agus Deswin	17	L	SMA	Pelajar	Karang Taruna

Sumber: Hasil Data Primer, 2022

## B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditelaah atau menggambarkan atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (*Ruslan, 2004:55*).

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Wirayuda
- b. Perangkat Desa Wirayuda
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa Wirayuda
- d. Karang Taruna Desa Wirayuda
- e. Unsur Masyarakat Desa Wirayuda

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, disamping menggunakan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik pengumpulan data ini akan sangat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian (Nawawi, 2007:100)

### a. Observasi

Metode pengamatan yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dilapangan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil pengamatan didapat berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa yang bersangkutan untuk mengetahui makna yang terdapat dibalik masalah-masalah yang ada. Hasil yang didapat dari pengamatan ini adalah bagaimana peranan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barata dalam pembangunan infrastruktur.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Di dalam wawancara yang memegang kendali utama adalah peneliti/pewawancara dan responden, dimana peneliti harus memperkenalkan diri kepada responden, menyampaikan maksud melakukan wawancara, dengan

demikian respon tidak merasa kuatir, juga termotivasi untuk menanggapi wawancara dari peneliti tersebut. (Victorianus Aries Siswanto, 2012:58).

Metode wawancara (*interview*) digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan jawaban tentang hal yang akan diteliti, dan juga wawancara digunakan peneliti apabila ingin mengetahui hal-hal yang mendalam terhadap peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wirayuda.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber di Desa Wirayuda, yaitu Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Masyarakat setempat.

#### c. Dokumentasi

Sugiyono ( 2017: 329) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak Desa Wirayuda mengenai data dokumentasi foto infrastruktur di Desa Wirayuda, profil pemerintah Desa Wirayuda, LPJ pembangunan infrastruktur di Desa Wirayuda, pada saat penelitian. Hal

ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dapat dilakukan dengan model deskriptif kualitatif dimana intinya adalah interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama proses penelitian. Analisa data dilakukan untuk menganalisis Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Analisis data kualitatif yang dilakukan meliputi (Sugiyono, 2017:67).

#### **a. Keabsahan Data (Triangulasi)**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain (Moelong, 2017:330). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moeleng, 2017:331). Hal itu dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus

selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami. Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid.

d. Menarik Kesimpulan

Berawal dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu dalam suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **A. Kondisi Geografis**

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Wira Yuda berada antara  $6^{\circ}30'17.40''$  -  $6^{\circ}31'50,77''$  LS dan  $110^{\circ}39'54.14''$  -  $110^{\circ}42'55.37''$  BT. Jika dilihat secara administrative maka Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah, memiliki luas wilayah 191,66 Km<sup>2</sup> atau 8,78% (persen) dari luas kecamatan Ketungau Tengah dengan suhu udara berkisar  $23^{\circ}$ - $33^{\circ}$ c. Faktor iklim Desa Wirayuda yang mencakup Musim Kemarau dan Musim Penghujan serta banyaknya Curah Hujan, cukup mempengaruhi terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat, Musim Kemarau di Desa Wirayuda biasanya terjadi pada bulan juni sampai bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan september sampai bulan Maret, dengan curah hujan rata-rata adalah  $\pm 500$  mm<sup>2</sup>, curah hujan tertinggi adalah  $\pm 285$  mm dan terendah  $\pm 150,50$ .mm.

Untuk Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan Desa) sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih harus menempuh sejauh 0,5 km, jarak dari pusat pemerintahan, sedangkan untuk jarak dari kota/ibukota kabupaten kurang lebih 100 km dan jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 500 km. Adapun Batas wilayah Desa Wirayuda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Swadaya dan Senangan Kecil Kecamatan Ketungau Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Argomulyo dan Panggi Ruguk Kecamatan Ketungau Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senangan Kecil Kecamatan Ketungau Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sumber Sari dan Margahayu Kecamatan Ketungau Tengah.

Desa Wirayuda memiliki Visi dan Misi demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun Visi dan Misi tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

Visi : “Menjadikan Desa Wirayuda sebagai Desa Teladan”

Dalam meraih Visi desa Wirayuda seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Visi Desa Wirayuda sebagai berikut :

- **Desa yang Teladan dalam bidang Administratif.**

Mengandung pengertian bahwa Desa Wirayuda harus mampu menjadi teladan dalam hal Administasi serta kepemilikan Dokumen Kependudukan.

- **Desa yang Teladan dalam bidang Pengelolaan Keuangan.**

Mengandung perngertian bahwa dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan dan dapat menggunakan keuangan yang ada untuk program pembangunan yang tetap sasaran.

- **Desa yang Teladan dalam bidang Kertanian.**

Mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Wirayuda harus mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan dibidang pertanian secara luas.

- **Desa yang Teladan dalam bidang Kesehatan.**

Mengandung pengertian menjadi Masyarakat Desa Wirayuda sebagai masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan Raga serta menjaga pola hidup sehat.

- **Desa yang Teladan dalam bidang Pendidikan.**

Mengandung pengertian menjadi Masyarakat Desa Wirayuda sebagai masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

- **Desa yang Teladan dalam bidang Kesejahteraan.**

Mengandung pengertian menjadikan Masyarakat Desa Wirayuda mampu mencapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan tentram).

Untuk meraih Visi Kepala Desa Wirayuda seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik

internal maupun eksternal, dalam Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, keadilan, kesejahteraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Maka disusunlah Misi Desa Wirayuda sebagai berikut:

- Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Aparatur Desa yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Memfasilitasi Masyarakat yang belum memiliki Dokumen Kependudukan.
- Mengajak Masyarakat Desa terlibat dalam pembangunan serta memberi hak pada masyarakat untuk mengajukan usulan pembangunan melalui RT atau Dusun.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata.

## B. Kondisi Demografis

### 2) Kependudukan

Desa Wirayuda terdiri dari dua (2) Dusun dan tiga belas (13) RT.

Tabel 2.1  
Penduduk Desa

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Persentase	Penduduk (Jiwa)	Persentase
1	Kebangak	426	69,2	1546	68,6%
2	Sebetuk	190	30,8	709	31,4%
Total		616	100	2255	100%

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Wirayuda sebanyak 2.225 jiwa, terdiri dari dua Dusun. Dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Dusun Kebangak, dengan jumlah penduduk 1.546 jiwa atau sekitar 68,6% dari total jumlah penduduk Desa Wirayuda dan memiliki Kepala Keluarga terbanyak di Desa Wirayuda. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 426 Kepala Keluarga atau sekitar 69,2% dari total Kepala Keluarga. Sedangkan Dusun Sebetuk merupakan Dusun dengan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga paling sedikit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 709 jiwa atau sekitar 31,4% dari total jumlah penduduk, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 190 Kepala Keluarga atau sekitar 30,8% dari total Kepala Keluarga. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga antara Dusun Kebangak dan Dusun Sebetuk. Hal itu disebabkan oleh karena Dusun Sebetuk merupakan Dusun pemekaran dari Dusun Kebangak yang daerahnya terpisah.

Tabel 2.2  
Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Penduduk (jiwa)				Total
			Laki-laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
1	Kebangak	426	746	67,1%	800	69,9%	1546
2	Sebetuk	190	365	32,9%	344	30,1%	709
Total		616	1111	100%	1144	100%	2255

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk di Dusun Kebangak berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah paling banyak di antara jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kedua Dusun yang ada di Desa Wirayuda. Dengan jumlah sebanyak 800 jiwa, sekitar 69,9% dari total jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau sekitar 35,47% dari total penduduk Wirayuda. Dan yang paling sedikit terdapat di Dusun Sebetuk berjenis kelamin perempuan sebanyak 344 jiwa, sekitar 30,1% dari total penduduk berjenis kelamin perempuan atau sekitar 15,25% dari total penduduk Desa Wirayuda. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki di Dusun Kebangak menempati urutan ke dua dengan jumlah penduduk sebanyak 746 atau sekitar 67,1% dari total penduduk berjenis kelamin laki dan sekitar 33,08% dari total penduduk Desa Wirayuda. Untuk urutan ketiga terdapat di Dusun Sebetuk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 365 atau sekitar 32,9% dari total jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki atau 16,18% dari total penduduk Desa Wirayuda.

### 3) Mata Pencaharian

Tabel 2.3  
Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Pekebun	382	16,9%
2	PNS/TNI/Polisi	164	7,27%
3	Karyawan Swasta	32	1,42%
4	Honorar	43	1,91%
5	Pedagang	16	0,71%
6	Wiraswasta	218	9,67%
7	Montir	3	0,13%
8	Lain-lain	1.397	62%
Total		2.255	100%

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Wirayuda masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau sudah tidak bekerja lagi. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat Desa yang masih menempuh Pendidikan, lanjut usia, ibu rumah tangga dan penduduk dengan usia bayi atau balita. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk yang tidak bekerja berdasarkan kriteria yang telah diuraikan pada tabel. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.397 jiwa atau sekitar 62% dari total penduduk Desa Wirayuda.

Mata pencarian Petani atau Pekebun menempati posisi kedua terbanyak dengan jumlah penduduk 382 jiwa atau sekitar 16,9% dari total jumlah penduduk Desa Wirayuda. Untuk Posisi ketiga terdapat pada jenis mata pencarian sebagai Wiraswasta sebanyak 218 jiwa atau sekitar 9,67% dari total penduduk Desa Wirayuda. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian paling sedikit yaitu penduduk dengan mata pencarian sebagai Montir sebanyak 3 jiwa atau sekitar 0,13% dari total penduduk Desa Wirayuda.

#### 4) Pendidikan

Tabel 2.4  
Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Buta Huruf	249	11%
2	Tidak Tamat SD	36	1,6%
3	SLTP	343	15,2%
4	SLTA	460	20,4%
5	Diploma	62	2,75%
6	Strata 1/Diploma	100	4,43%
7	Lain-lain	1.005	44,6%
Total		2.255	100%

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Wirayuda jenis uraian pendidikan lain-lain adalah masyarakat yang tidak memiliki Pendidikan dan belum mencukupi usia untuk menempuh Pendidikan, menempati posisi tertinggi dalam jenis uraian berdasarkan Pendidikan. Dengan jumlah 1.005 jiwa atau sekitar 44,6% dari total penduduk Desa Wirayuda. Posisi kedua ada pada jenjang Pendidikan SLTA/SMA sebanyak 460 jiwa atau sekitar 20,4% dari total penduduk Desa Wirayuda dan memiliki selisih antara jenis uraian lain-lain sebanyak 545 jiwa atau sekitar 24,16% dari total penduduk Desa Wirayuda. Masyarakat yang Tidak Tamat SD merupakan masyarakat paling sedikit berdasarkan Pendidikan di Desa Wirayuda sebanyak 36 jiwa atau sekitar 1,6%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa di Desa Wirayuda masih banyak masyarakat yang belum menempuh Pendidikan dan masyarakat buta huruf serta tidak



menyelesaikan Pendidikan SD. Setelah dilakukan perhitungan berjumlah 1.290 jiwa atau sekitar 57,20% dari total penduduk Desa Wirayuda. Hal ini membuktikan bahwa di Desa Wirayuda kesadaran akan pentingnya Pendidikan masih kurang.

Tabel 2.5  
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (buah)	Persentase
1	TK/PAUD	2	22,2%
2	SD	4	44,4%
3	SMP	2	22,2%
4	SMA	1	11,1%
Total		9	100%

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Suatu Pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik jika sarana prasarana tidak mendukung. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang berjalannya Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan dari tabel yang telah peneliti uraikan di atas bahwa di Desa Wirayuda Sarana Prasarana untuk SD terbanyak dengan jumlah 4 buah atau sekitar 44,4% dari total prasarana Pendidikan, dan yang paling sedikit yaitu sarana prasarana SMA dengan jumlah 1 buah atau sekitar 11,1% dari total sarana prasarana Pendidikan.

#### 5) Agama

Pada Desa Wirayuda sendiri agama yang dianut oleh masyarakat Desa cukup bervariasi. Namun hubungan antar umat beragama berjalan sangat harmonis. Adapun rincian pemeluk agama Desa Wirayuda dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.6  
Agama

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam	566	25,1%
2	Kristen	1189	52,7%
3	Katholik	497	22%
4	Budha	3	0,13%
Total		2255	100%

*Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Wirayuda, 2022*

Kerukunan umat beragama dapat dilihat dari saling toleransi antar umat, menghargai perbedaan adalah bentuk toleransi umat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wirayuda terdapat beberapa jenis agama yang dianut oleh masyarakat Desa Wirayuda dan seluruh masyarakat memiliki agama, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki agama, walaupun ia adalah seorang bayi yang baru lahir ia sudah memperoleh agama dari agama yang telah dianut oleh kedua orangtua bayi tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis agama dengan penganut terbanyak ada pada agama Kristen dengan jumlah sebanyak 1189 jiwa atau sekitar 52,7%. Hal ini membuktikan di Desa Wirayuda mayoritas agama adalah beragama Kristen. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa agama Kristen di Desa Wirayuda memiliki dua (2) aliran, yaitu GKII (Gereja Kemah Injil Indonesia) dan GKE (Gereja Kalimantan Evangelis). Walaupun memiliki dua (2) aliran tetapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan hanya saja dalam tata ibadah yang memiliki perbedaan. Dan paling sedikit terdapat pada agama Budha dengan jumlah penduduk sebanyak 3 jiwa atau sekitar 0,3%. Masyarakat dengan agama Budha ini adalah satu (1) keluarga dan tidak ada tempat untuk beribadah.

### **C. Kondisi Ekonomi**

Sumber Ekonomi atau Mata Pencarian Penduduk Wirayuda beragam, ada yang Petani, Pedagang, Buruh, Pegawai Negeri Sipil, dan Lain sebagainya. Pada Desa Wirayuda sendiri mayoritas matapencaharian masyarakat adalah petani. Dengan digunakan bibit unggul Karet untuk Karet Rakyat, telah banyak membantu memperbaiki perekonomian masyarakat Desa, peningkatan ekonomi tersebut telah membawa kearah perubahan yang positif hal ini telah terbukti dengan banyaknya dibangun rumah permanen yang terbuat dari beton, rata-rata memiliki sepeda motor, Televisi, Hand Phone, bahkan sudah ada warga yang memiliki Mobil. Dan secara umum pula sudah tidak ada lagi penduduk yang sulit untuk makan sehari-hari.

Walaupun kondisi ekonomi dan kehidupan sosial sudah jauh mengalami kemajuan namun masih terdapat penduduk yang hidup miskin, pemerintah juga telah berupaya membantu melalui distribusi Raskin kepada masyarakat miskin.

### **D. Kondisi Sosial Budaya**

Di Desa Wirayuda masyarakat pada umumnya beretnis Dayak, sehingga dalam tatanan adat istiadat juga masih cukup kental mewarnai kehidupan sosial masyarakat, dan sampai saat ini masih ada tradisi yang masih dipelihara seperti Gawai padi yaitu Syukuran setelah panen atau gawai panen, gunanya adalah untuk saling mengikat hubungan kekeluargaan, dan antar warga.

Penyelesaian perkara yang terjadi pada umumnya diselesaikan dengan cara Hukum adat, yang berjenjang dari Pengurus Adat, dan Temenggung dan apabila masih tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui hukum positif atau hukum yang telah ditentukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.7  
Pengurus Adat Desa

NO	Nama	Jabatan	JK	Persentase
1	Empuyu	Temenggung	L	25%
2	Engkamad	Ketua LAD	L	25%
3	Hardiman	Ketua Adat Dusun Kebangak	L	25%
4	Paskalis sensus	Ketua Adat Dusun Sebetuk	L	25%
Total				100%

Sumber data: Desa Wirayuda, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kepengurusan adat di Desa Wirayuda semuanya adalah berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada masyarakat berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat Desa Wirayuda masih meyakini bahwa laki-laki memiliki kedudukan tertinggi di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat masih percaya bahwa laki-laki adalah manusia yang kuat. Sedangkan perempuan merupakan makhluk yang lemah, dianggap tidak bisa menyelesaikan pertikaian jika hal tersebut terjadi.

## **E. Kondisi Wilayah**

### **a. Kondisi Tanah**

Pada umumnya kondisi Tanah di desa Wirayuda adalah lahan kering dan sedikit gambut.

b. Kondisi Sungai

Kondisi sungai di desa Wirayuda cukup banyak ada dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Ketungau dan Sungai Merakai. Dengan lebar berkisaran antara 50-60 meter, kedua sungai tersebut masih banyak difungsikan Masyarakat, untuk alur Transportasi baik itu ke dusun-dusun maupun ke Desa tetangga yang masih melewati Alur sungai disamping itu Alur sungai masih digunakan oleh masyarakat desa untuk keladang atau menuju lahan perkebunan. Untuk keperluan sehari-hari Masyarakat Desa masih ada yang menggunakan sungai sebagai sumber air bersih dan mandi.

c. Lahan Hutan

Di Desa Wirayuda masih terdapat Hutan namun belum ditetapkan menjadi Hutan Lindung atau Hutan Adat.

d. Lahan Pertanian

Lahan kering ada pada umumnya telah digunakan untuk ladang /areal pertanian, pemukiman, pekarangan, dengan luas dataran kering  $\pm 5.370$  Ha, Dataran Basah  $\pm 3.100$  Ha, Rawa  $\pm 300$  Ha, dan Sungai/Danau  $\pm 10$  Ha.

**F. Kondisi Pemerintah Desa Wirayuda**

**1. Pemerintah Desa**

Desa wirayuda terdiri dari 2 (dua) Dusun dan 13 (tiga belas) RT, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Wirayuda Dipimpin Oleh Kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa serta didampingi oleh Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehari-hari, Pemerintahan Desa juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan antara lain PKK Desa, lembaga Adat (Kepala Adat) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Dapat dilihat pada uraian table dibawah ini:

Tabel 2.8  
Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Salawati Hehdman, SE	Kepala Desa	S1	L
2	Johansius.N,S.Hut	Sekretaris Desa	S1	L
3	Selimun	Kaur Pemerintahan	SMA	L
4	Lazarus Angking	Kaur Ekbang	SMA	L
5	Dedi	Kaur Umum	SMA	L
6	Tri Lesmana Diputra	Bendahara	SMP	L
7	Supriyadi	Kepala Dusun	SMP	L
8	Lionsius Tamrin	Kepala Dusun	SMP	L

Sumber data: Desa Wirayuda, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Wirayuda semuanya berjenis kelamin laki-laki, tidak ada perempuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa perempuan di Desa Wirayuda tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menjadi Perangkat Desa sehingga di Desa Wirayuda semua Pemerintah Desa berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut merupakan bentuk permasalahan yang ada di Desa Wirayuda, karena seharusnya pemerintah desa harus ada keterwakilan perempuan di dalamnya supaya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bisa dilaksanakan seimbang, mewakili kepentingan perempuan.

Tingkat Pendidikan pada pemerintah Desa Wirayuda sudah bisa dikatakan cukup baik, hal ini bisa kita lihat bahwa kepala Desa Wirayuda adalah lulusan sarjana (SE), dari gelar sarjana yang diperoleh bisa dilihat kepala Desa Wirayuda memahami tentang perekonomian yang ada di Desa. Seperti yang kita ketahui untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu daerah akan dilihat dari pertumbuhan ekonominya, jika kepala Desa memahami kebutuhan dan permasalahan ekonomi di masyarakatnya maka Desa tersebut akan maju dan berkembang.

Namun walaupun demikian terdapat permasalahan pada pemerintah Desa wirayuda. Dimana seorang bendahara Desa hanya lulusan SMP, yang tentu dapat diukur tingkat pengetahuan dan kemampuannya. Jika seorang bendahara hanya lulusan SMP apakah dia bisa menyelesaikan tugas perbendaharaannya? Ini menjadi permasalahan penting di Desa Wirayuda, karena tugas dan tanggung jawab seorang bendahara sangat besar terhadap pengelolaan keuangan Desa demi terlaksananya kegiatan di Desa. Tetapi walaupun demikian persoalannya, bendahara di Desa Wirayuda masih bisa melaksanakan tugasnya sebagai bendahara Desa, hanya saja sering mendapatkan arahan atau petunjuk dari kepala Desa.

Selain itu di Desa Wirayuda kepala Dusun masih lulusan SMP. Hal tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan. Seperti yang kita ketahui sudah tercantum di UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 50 ayat 1 (a) yang menyebutkan bahwa “Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang Sederajat”.

Hal ini terjadi dikarenakan tidak banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi perangkat Desa. Seperti yang diketahui bahwa sebelum UU Desa berlaku pemerintah Desa gajinya sedikit, inilah salah satu alasan mengapa banyak masyarakat yang tidak berminat menjadi perangkat Desa. Setelah UU Desa berlaku tidak diterapkan dengan baik, hal ini dikarenakan perangkat Desa masih menganggap dia masih memiliki hak untuk melaksanakan tugas. Karena selain diukur dari tingkat Pendidikan, perangkat Desa masih bisa melaksanakan tugas sampai usia maksimal 60 tahun.

Tabel 2.9  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Alipius, S.Pd.K	Ketua	S1	L
2	Natanel, SH	Wakil Ketua	S1	L
3	Eko Rahmanto	Sekretaris	STM	L
4	Agustinus Surek	Anggota	SMEA	L
5	Alexander Yosa	Anggota	STM	L
6	Sumarni	Anggota	SMA	P
7	Martias Eges	Anggota	Paket B	L
8	Bawan	Anggota	Paket B	L
9	Ayub	Anggota	Paket B	L

Sumber data: Desa Wirayuda, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Wirayuda pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah ada keterwakilan perempuan, hanya saja, jika diperhatikan tidak sesuai dengan jumlah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wirayuda. Dengan jumlah 9 orang Badan Permusyawaratan Desa seharusnya keterwakilan perempuan dua (2) orang agar adanya kesesuaian dengan jumlah Badan Permusyawaratan Desa



yang ada. Selain itu pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wirayuda masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih berpendidikan Paket B, yaitu sebanyak tiga (3) orang atau sekitar 33,33% dari total Badan Permusyawaratan Desa Wirayuda.

Namun walaupun demikian untuk ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirayuda sudah memiliki Pendidikan sarjana, dengan bekal Pendidikan sarjana tersebut diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Wirayuda. Mayoritas Pendidikan pada Badan Permusyawaratan Desa Wirayuda adalah SMA atau sederajat dengan jumlah empat (4) orang atau sekitar 44,44% dari total Badan Permusyawaratan Desa Wirayuda.

Tabel 2.10  
PKK Desa Wirayuda

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Sumarni	Pembina	S1
2	Magdalena	Pembina	S1
3	Perawati, SE	Ketua	S1
4	Bernadeta	Wakil Ketua	SMA
5	Agata Endang	Sekretaris	SMA
6	Suraidi Lati	Wakil Sekretaris	SMA
7	Hervina	Bendahara	SMK
8	Tri Siniria	Wakil Bendahara	STM
9	Ningsih	Ketua Pokja I	SMA
10	Wati	Ketua Pokja Ii	SMA
11	Nani Sumarni	Ketua Pokja Iii	SMA
12	Theresia Nurjanah	Ketua Pokja Iv	PAKET C
13	Ayang Irtika Leluwati	Wakil Ketua Pokja I	SMA
14	Lin Herawati	Sekretaris	SMEA
15	Lily Maryani	Anggota	SMEA
16	Tinawati	Anggota	SMP
17	Sri Kartini	Wakil Ketua Pokja Ii	STM
18	Irma Afnara	Sekretaris	STM

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
19	Suraida Lati	Anggota	SMA
20	Roslina Muslim	Anggota	SMP
21	Lusiana	Wakil Ketua Pokja Iii	PAKET C
22	Agustina Susanti	Sekretaris	SMP
23	Martina Lati	Anggota	SMA
24	Ida Lena	Anggota	PAKET B
25	Dwi Minarsih	Wakil Ketua Pokja Iv	SMA
26	Duriana	Sekretaris	SMA
27	Rosnalia	Anggota	SMP
28	Siti Nurjani	Anggota	SMEA

Sumber data: Desa Wirayuda, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kepengurusan PKK Desa Wirayuda berjumlah 28 orang, memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Terdapat 2 (dua) orang Pembina dan 1 (satu) orang Ketua. Dengan adanya Pembina diharapkan PKK Desa Wirayuda bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta memberikan pengarahan dan pengawasan kepada PKK.

Pada PKK Desa Wirayuda Terdapat dari empat (4) Pokja. Pada setiap Pokja memiliki kepengurusan masing-masing, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan terdapat 2 (dua) anggota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepengurusan tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan Desa. Seperti diketahui bahwa di Desa Wirayuda masyarakatnya selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, di Desa Wirayuda juga banyak RT.

Dari tabel di atas kita juga dapat melihat bahwa bendahara pada PKK Desa Wirayuda hanya ada 1 (satu) orang walaupun memiliki 4 (empat) Pokja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan

bendahara satu orang memiliki tujuan agar terkendalinya seluruh pengelolaan keuangan PKK Desa Wirayuda.

Pada kepengurusan PKK Desa Wirayuda bila dilihat dari tingkat Pendidikan sudah cukup baik. Setiap kepengurusan mayoritas berpendidikan walaupun ada beberapa yang memiliki Pendidikan dengan Pendidikan Paket B maupun Paket C. Hal ini bisa dilihat dari total tingkat Pendidikan SMA merupakan Pendidikan paling banyak pada kepengurusan PKK Desa Wirayuda dengan jumlah 11 orang atau sekitar 39,28% dari total jumlah kepengurusn PKK Desa Wirayuda begitupula jika di lihat dari total jenis Pendidikan yaitu sebanyak 8 jenis, lulusan SMA paling tinggi. Dan paling sedikit yaitu tingkat Pendidikan Paket B yaitu sejumlah 1 orang atau sekitar 3,57%.

Tabel 2.11  
Daftar Rukun Tetangga (RT)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Anton Sujarwo	Ketua RT 01	SMA
2	Kaprawi	Ketua RT 02	SMP
3	Yuswandi	Ketua RT 03	SMA
4	Syafarudin	Ketua RT 04	SMA
5	Jipin, S.Pd	Ketua RT 05	SMP
6	Safrijon	Ketua RT 06	SMP
7	Andreas.B	Ketua RT 07	SMP
8	Rusman	Ketua RT 08	SMA
9	Jamaludin	Ketua RT 09	SMA
10	Akim	Ketua RT 010	SMP
11	Supriyadi	Ketua RT 011	SMP
12	Yosef	Ketua RT 012	SMP
13	Rimin	Ketua RT 013	SMP

Sumber data: Desa Wirayuda, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Wirayuda memiliki 13 RT yang terbagi di 3 Dusun. Seperti yang kita ketahui bahwa RT merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa. Pada Desa Wirayuda sendiri RT memiliki peran penting di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Wirayuda bahwa RT semuanya berjenis kelamin laki-laki tidak ada perempuan. Hal ini sama dengan pemerintah Desa Wirayuda sendiri yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa di Desa Wirayuda masih sangat menghormati martabat laki-laki, laki-laki masih dianggap sebagai orang yang kuat dan mampu dalam menjalankan tugas. Tidak halnya dengan perempuan, yang selalu dianggap sebagai makhluk lemah, dianggap tidak bisa menjalankan tugas.

Dilihat dari tingkat Pendidikan pada semua RT yang ada di Desa Wirayuda mayoritas berpendidikan SMP dengan jumlah 8 orang atau sekitar 61,53% dari total jumlah RT yang ada. Dan paling sedikit yaitu memiliki pendidikan SMA sejumlah 5 orang atau sekitar 38,46% dari total RT. Hal ini bisa dilihat bahwa RT yang ada di Desa Wirayuda semuanya memiliki Pendidikan, walaupun mayoritas tamatan SMP. Namun

walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai RT.

## **2. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang ada di Desa saat ini masih belum memiliki tolak ukur yang memadai, namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sudah berjalan dan meliputi hal-hal seperti dibawah ini :

- 1) Memimpi Penyelenggaran Pemerintahan Desa,
- 2) Membina Kehidupan Masyarakat Desa,
- 3) Mengkoordinasi seluruh Pembangunan yang ada di Desa,
- 4) Memliharan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- 5) Melaksanakan kehidupan Demokrasi,
- 6) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,
- 7) Menjalin Hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa,
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa,
- 9) Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa,
- 10) Membina, Mengayomi dan Melestarikan Nilai-Nilai sosial Budaya dan Adat Istiadat,
- 11) Mengembangkan Potensi Sumber daya alam dan meletarikan lingkungan hidup, dan Hal-hal lain yang bersifat isidentil.

### **3. Strategi Umum dan Prioritas Desa**

#### **a. Strategi Umum**

- a. Dengan Berusaha Melaksanakan Tugas dan Kewajiban yang merupakan salah satu Amanah dalam Melayani Masyarakat dengan Hati Nurani yang jernih, Lapang dada, dan Bertanggung Jawab.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam juga peningkatan dalam sektor Pembangunan dan beberapa Bidang terdiri dari :Bidang Pemerintahan, Hukum, Keagamaan, dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Pendidikan , Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan, Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan.
- c. Pembangunan masyarakat dengan mewujudkan sarana infrastruktur sesuai dengan Aspirasi masyarakat berdasarkan Musyawarah dengan Badan Pemusyawaratan Desa Wirayuda

#### **b. Prioritas Desa**

- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan di Desa.
- b. Air bersih (Pipanisasi)
- c. Pemberian bantuan makanan tambahan pada Posyandu.
- d. Perbaikan dan pembelian Sarana Olah Raga.
- e. Perbaikan tempat/Fasilitas Umum
- f. Memberikan bantuan dan fasilitas kepada pengurus adat yang memerlukan.

- g. Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Pendidikan Tingkat SD dan SMP Terbuka.
- c. Pembangunan Kesehatan
  - Mengupayakan adanya Puskesmas Pembantu atau postu di dusun-dusun yang di lengkapi dengan tenaga medis/para medis dan bidan desa.
  - Mendukung kegiatan posyandu, UKS dan pelatihan bagi bidan kampung, maupun kader kesehatan desa.
  - Menggalakan Program Kesehatan Desa, Melalui melalui bersih lingkungan.
- d. Peningkatan SDM
  - Mengupayakan berdirinya PAUD?TK di dusun-dusun.
  - Mengupayakan pemuda/pemudi putus sekolah untuk memperoleh kesempatan kursus keterampilan.
  - Memberikan dukungan berupa bantuan kepada para perangkat Desa dan BPD untuk pelatihan maupun study banding.
  - Meningkatkan dan menyediakan sarana penyuluhan, berupa pertemuan dan penyelenggaraan pelatihan atau penyuluhan sesuai kebutuhan kelompok tani atau kelompok usaha yang ada.
- e. Penguatan Lembaga Adat
  - Memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi kepada lembaga adat yang ada di Desa.
  - Mengusahakan penyelesaian perkara melalui lembaga adat.

f. Penguatan Lembaga-Lembaga Sosial Masyarakat

Membentuk dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang diperlukan antara lain LPM, RT, Karang taruna, mudika, dan kelompok-kelompok tani, memajukan Club olahraga yang ada di desa.

**4. Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wirayuda terdapat beberapa masalah yang terjadi, dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- 1) Pada Umumnya Pemerintahan Desa Wirayuda sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun tidak dipungkiri masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebabkan oleh masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para Aparatur Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di Desa, untuk itu diperlukan suatu bimbingan terus menerus dari Pemerintah yang lebih tinggi baik dalam upaya peningkatan kapasitas para aparatur Pemerintah Desa.
- 2) Hubungan antara lembaga yang ada di desa cukup baik sehingga di dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa, kepala desa beserta perangkat Desa cukup terbantu dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, namun lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut belum disertai dengan dasar hukum yang memadai berupa Peraturan Desa.



- 3) Kurangnya staf/perangkat teknis di desa, karena desa Wirayuda memiliki jumlah penduduk cukup banyak dengan kondisi jarak tempuh ke dusun cukup jauh dan biaya mobilisasi cukup besar (Jalur sungai) sehingga dalam penyusunan perdes tentang APBD desa sedikit terhambat.
- 4) Terbatasnya saran dan SDM petugas/perangkat desa dalam menyusun dan meng-SPJ kan dana yang diterima, solusinya perlu penambahan sarana kerja dan peningkatan SDM melalui bimtek-bimtek.
- 5) Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan juga masih sangat minimnya proyek-proyek pemerintah yang dikucurkan di desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas di desa.
- 6) Masih sangat sulit untuk memprediksi swadaya masyarakat guna mendukung atau melaksanakan proyek-proyek pembangunan di desa.
- 7) Masih sangat terbatasnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa terdapat beberapa pembangunan yang masuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa Wirayuda tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12  
Rencana Pembangunan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Rabat Beton	RT 03	300 meter
2	Rabat Beton	RT 07	200 meter
3	Air Bersih	RT 01	1 paket
4	Irigasi	RT 04	300 meter
5	Gedung PAUD	Desa Wirayuda	1 buah
6	Kantor Desa	Desa Wirayuda	1 buah
7	Jalan Tani	RT 10	500 meter

Sumber Data: Pemerintah Desa Wirayuda Tahun 2022

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah desa Wirayuda telah berupaya merencanakan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan di masyarakat. Banyaknya aspirasi dari masyarakat tidak dapat ditampung semua dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, namun walaupun demikian pemerintah desa Wirayuda telah berusaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat desa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa yang mengamankan desa untuk mengelola Dana Desa demi memenuhi kewenangan desa, salah satunya kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. pada pelaksanaan pembangunan desa ini banyak desa-desa yang belum bisa melaksanakan kewenangan tersebut dikarenakan pada desa-desa tersebut pemerintah desa tidak memiliki kapasitas.

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wirayuda, maka penulis pada bab ini akan berusaha memberikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan topik skripsi. Kesimpulan dipaparkan berdasar atas hasil pengamatan dari data-data wawancara dengan 15 (lima belas) narasumber.

#### **1. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.**

Pemerintah Desa Wirayuda sudah memiliki kemampuan di dalam melaksanakan pembangunan, hanya saja pada proses pembangunan harus adanya aspek-aspek kemampuan yang mendukung agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang ada. Adapun aspek kemampuan tersebut, yaitu kemampuan fisik,

kemampuan keuangan, kemampuan teknis dan kemampuan konseptual serta harus ada kerjasama dan partisipasi dari masyarakat desa.

Kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat penting menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan terlebih pada pembangunan yang ada di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pemerintah desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Keberadaan pemerintah desa yang juga disertai tugas dibidang pembangunan desa, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah desa tersebut yang menyangkut berbagai pembangunan sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, fasilitas desa yang lengkap dan mendukung serta mengetahui strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving).

## 2. Pemahaman Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Pemerintah desa Wirayuda memiliki pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat

masyarakat yang tidak menyukai masa kepemimpinan Kepala Desa karena menganggap Pemerintah Desa pilih kasih dan tidak memperhatikan semua masyarakatnya. Namun walaupun demikian pemerintah desa masih bisa menunjukkan kinerjanya didalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun berbagai infrastruktur di desa berdasarkan atas aspirasi masyarakat dan dilaksanakan pembangunan yang menjadi prioritas di desa.

### 3. Keterampilan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Pemerintah Desa Wirayuda belum memiliki keterampilan di dalam pembangunan infrastruktur desa, hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab berdasarkan target yang telah ditentukan. Pada keterampilan pemerintah desa sendiri, pemerintah desa tidak berani untuk melanggar aturan, dan mereka hanya menjalankan perintah dan arahan dari kepala desa.

Kepala desa memiliki kekuasaan penuh terhadap perangkat desa, hal ini dibuktikan dengan patuhnya perangkat desa terhadap segala bentuk perintah yang diberikan kepala desa dan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang sudah menjadi rencana awal dan tidak dapat diubah, dalam pelaksanaannya tidak ada kreativitas, terlalu monoton, berpaku pada pedoman. Namun walaupun demikian sebenarnya pemerintah desa sudah bekerja dengan baik, dimana mereka lebih patuh pada peraturan dan tidak melanggarnya, hanya memang pemerintah desa tidak bisa mengembangkan dirinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Desa Wirayuda**

- a. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan cara meningkatkan kompetensi melalui kewajiban pendidikan lanjutan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- b. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa harus lebih adil, agar tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat.
- c. Pemerintah desa harus memiliki kreativitas, berinisiatif melakukan pekerjaan tidak harus selalu menunggu perintah dan arahan dari kepala desa.

### **4. Bagi Masyarakat Desa Wirayuda**

- a. Masyarakat harus mampu mengusulkan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan utama seluruh masyarakat, bukan atas kebutuhan individu pada masyarakat.
- b. Masyarakat desa harus bisa memahami kemampuan pemerintah desa. tidak hanya selalu menuntut, tetapi ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Masyarakat harus memiliki inisiatif untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur, tidak menunggu arahan dari pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amirullah dan Budiyo, Haris. 2014. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Asnudin, 2005, "Manajemen Proyek Konstruksi", UNTAD Press-Palu.
- C.S.T. Kansil. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bateman, Thomas S dan Snell, Scoot A. 2012. *Manajemen: Kepemimpinan dan Kalaborasi Dunia yang Kompetitif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Pembaruan
- Kasmir. Jakfar. 2013. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ketaren, S. 2008. *Minyak dan Lemak Pangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : POLGOV UGM
- Moh Hasan Sabilil Maula. 2017. *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Jember: Repository Universitas Jember.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Namawi, Hadiri. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Rakhmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soamole, Junaidi 13520198. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar Baru Algensido Offset.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : CV. Sinar Baru
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

### **Sumber Jurnal**

- Ari Kusumah Wardani, Slamet Riyadi. 2020. Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. Ciamis: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Taupiq Gandhi Mahatma, Rury Febrina. 2020. Kapasitas Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Bersumber Dana Desa. Riau: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
- Tui, Fenti Prihatini. 2020. “KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
- Sulandra, Made & Mudarya, Nyoman. 2018. “Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa”. Universitas Panji Sakti. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1



### **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 6 Tahun 2015 Tentang Desa

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Program PPIP (2006). Departemen Pekerjaan Umum  
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.

Pedoman Umum Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (2006).  
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

### **Sumber Internet**

<https://simantu.pu.go.id/personal/imgpost/autocover/0beef0af93a85932d917dac276844957.pdf>, diakses 14 September 2022

<https://www.masterplandes.com/infrastruktur/pembangunan-infrastruktur-berbasis-partisipasi-masyarakat/>, diakses 14 September 2022

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82844?show=full>, diakses 17  
September 2022

<https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/221>, diakses 18  
September 2022

<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2019/06/26/indonesia-boosting-rural-government-capacity-infrastructure-and-citizen-engagement-to-accelerate-poverty-reduction>, diakses 20 September 2022

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **PERTANYAAN SECARA UMUM**

1. Apakah saudara/I mengetahui tentang pembangunan infrastruktur di Desa?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ?
3. Bagaimana pemerintah desa merespon aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Desa?
4. Bagaimana dampak (positif/negative) pembangunan infrastuktur di Desa?
5. Apa kritik dan saran saudara/i terkait pembangunan infrastruktur di Desa?

#### **A. Kemampuan**

1. Apakah pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
4. Apakah terdapat sumberdaya yang memadai dalam pembangunan infrastruktur di Desa?
5. Bagaimana sikap pemerintah desa jika sumberdaya tidak memadai dalam pembangunan infrastruktur desa?
6. Bagaimana hubungan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa?

#### **B. Pemahaman**

1. Bagaimana pemerintah desa menjelaskan kepada masyarakat tentang pembangunan infrastruktur di desa?
2. Apakah pemerintah desa memahami pembangunan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa?
3. Jika memahami, apa saja pembangunan yang dilakukan oleh desa dan dari mana sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa?
4. Bagaimana sikap/respon masyarakat/pemerintah desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa?
- 5.

### **C. Keterampilan**

1. Bagaimana respon pemerintah desa/masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang belum dilaksanakan di desa?
2. Apakah ada inisiatif dari masyarakat/pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang belum ada di desa?
3. Apa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyikapi permasalahan pembangunan infrastruktur di desa?
4. Bagaimana cara pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan dana yang terbatas?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



